



IMPLEMENTASI PROGRAM PERMAKINAN LANJUT USIA (LANSIA) OLEH KEMENTRIAN SOSIAL MELALUI KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

¹Cucun Lestiani

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung, Jawa Barat

fathiairin2016@gmail.com

Received 09 November 2024; Revised: 10 November 2024; Accepted: 1 January 2025; Published: January 2025; Available online: January 2025

ABSTRAK

Peneliti melihat Kecamatan Paseh menjadi salah satu kecamatan yang menerima atau menyetujui untuk penyaluran program bantuan permakanan lanjut usia dengan alasan Kecamatan Paseh memiliki pencapaian baik dalam verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti bagaimana program ini berjalan di Kecamatan Paseh sementara angka kemiskinan lebih tinggi dengan angka penerima manfaat permakanan lansia yang persentasenya jauh lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) oleh Kementerian Sosial melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Teori menurut Meter dan Horn dengan empat dari enam indikator yang digunakan yaitu: Tujuan, sumberdaya, Disposisi, dan Agen pelaksana. Hasil Penelitian menunjukkan; Program permakanan lansia memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia melalui penyediaan makanan bergizi. Program permakanan lansia juga memiliki alokasi anggaran yang terealisasi dengan baik dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara berbagai lembaga dan organisasi guna memperkuat implementasi dan memungkinkan sinergi sumber daya dan Mekanisme pemantauan efektif membantu dalam mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Kemampuan agen pelaksana untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan operasional memastikan program tetap relevan dan efektif dan Agen pelaksana dengan kompetensi dan dedikasi yang tinggi memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan program. Keterampilan manajemen dan empati terhadap lansia mendukung pelayanan yang berkualitas.

Kata Kunci: Implementasi, POKMAS, Permakanan Lansia

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan (Fuadi, 2021). Peningkatan yang terjadi tersebut tentunya memiliki tantangan, kelebihan dan kekurangannya tersendiri (Rahmawati, 2021). Sejalan dengan

hal tersebut negara/pemerintah sudah seharusnya bisa mengimbangi hal tersebut dengan mengadakan peningkatan kesejahteraan Masyarakat; baik dari tingkat pendidikan, kesehatan maupun perekonomian (Siti Saputri Febriyanti, 2019).

Dalam konteks Indonesia; kesejahteraan bisa dilihat

berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa *"Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya"*. Yang dalam penjabarannya maka tugas tersebut diperuntukan bagi Kementerian Sosial dengan tugas menyelenggarakan urusan dibebberapa bidang seperti; Rehabilitasi Sosial (Rehabsos), Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas), serta Penanggulangan Bencana (PB) yang semata-mata diperuntukan untuk membatu presiden dalam menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan sosial.

Perlu ditambahkan juga, bahwa setiap program dari Kementerian Sosial senantiasa selalu berhubungan erat dengan Dinas Sosial yang berada Tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota sebagai kaki tangan guna tercapai dan tersalurkannya program-program Kesejahteraan Sosial tersebut (Elsye Rahmawaty, 2019). Dinas Sosial Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur (Chairika Nasution, 2016). Begitu pun sama halnya dengan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial Kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kementerian sosial saat ini memiliki sejumlah program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Masih banyak program lainnya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Diantaranya Program yang dikhususkan untuk lansia yaitu Permakanan Lansia yang diberikan tiap hari kepada para lansia supaya para lansia tidak harus repot-repot memikirkan harus makan apa hari ini? Karena makanan yang disajikan sudah siap Konsumsi. Program ini di laksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kecamatan. Setiap penerima bantuan sosial program dari kementerian sosial merujuk kepada data terpadu kesejahteraan sosial atau sering disebut DTKS. DTKS ini menjadi acuan nyata untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial di Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 18/4/HK. 01/01/2024 tentang petunjuk Teknis Pemberian Permakanan Bagi lanjut Usia keluarga tunggal, Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) di 31 Kecamatan yang

ada di Kabupaten Bandung dengan Surat Keputusan pembentukan kelompok masyarakat ditandatangani oleh para camat yang ada di Kabupaten Bandung. Penelitian ini di fokuskan pada kegiatan kelompok Masyarakat pada program permakanaan lanjut usia yang dimana program ini merupakan dari Kementerian Sosial yang dijalankan bersama Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Dalam beberapa catatan, lanjut usia dikategorikan sebagai seseorang yang dikaruniai umur panjang terutama untuk yang berumur di atas enam puluh tahun (60 tahun) (Sintya Risfi, 2019). Lanjut usia sendiri dapat terbagi dalam dua kategori, pertama lanjut usia potensial atau lanjut usia yang masih produktif masih dapat bekerja. Kedua lansia tidak potensial atau kebalikan dari lanjut usia potensial yaitu lanjut usia yang menghabiskan waktunya di tempat tidur, tidak dapat bekerja karena mengalami penurunan kemampuan fisik, dan bergantung pada bantuan orang lain (Herry, 2023). Tercatat Pada tahun 2023 jumlah penduduk diseluruh wilayah Indonesia sekitar 278,7 juta jiwa (Badan Pusat Statistika, 2023).

Dengan jumlah penduduk tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan yang timbul seperti masalah kemiskinan (Elda Azizah Wahyu, 2018). Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi oleh jutaan umat manusia di seluruh dunia (Istan, 2017). Kemiskinan ini menjadi salah satu dari banyak masalah yang dihadapi negara di

dunia, baik dalam negara maju maupun negara berkembang (Amsal, 2018). Namun, biasanya lebih banyak dihadapi oleh negara yang sedang berkembang karena pembangunan dalam negara tersebut belum stabil. Kemiskinan sendiri dapat dijadikan sebagai patokan yang menunjukkan bahwa belum sejahteranya Masyarakat (Ras, 2013).

Data sunsenas Maret 2023 memperlihatkan sebanyak 11,75 % adalah lanjut Usia (lansia) dan dari hasil proyeksi penduduk didapatkan rasio ketergantungan lansiasebesra 17,08 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (umur 15 – 59 tahun) menanggung sekitar 17 orang lansia. Jumlah ini merupakan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan jumlah populasi lansia di Indonesia 10 tahun lalu yang jumlahnya 7,75 % dari jumlah populasi di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia sudah berada pada fase negara berstruktur penduduk menua (*ageing population*). *Ageing population* bisa menjadi bonus demografi kedua bagi Indonesia ketika proporsi lansia semakin meningkat dan diikuti peningkatan produktifitas sehingga bisa memberikan sumbangan bagi perekonomian negara, akan tetapi lansia bisa menjadi tantangan pembangunan ketika mereka tidak lagi produktif dan menjadi golongan kelompok rentan (Heryanah, 2015). Saat ini di Indonesia telah memasuki *fase aging population* dimana populasi lansia berada pada presentase lebih dari 10 %.

Jumlah lansia di proyeksikan melonjak hampir 22% pada tahun

2050 Banyaknya populasi lansia di Indonesia menyebabkan isu lansia menjadi penting untuk diperhatikan secara khusus, salah satu isu lansia di Indonesia yang memiliki presentasi cukup tinggi adalah lansia terlantar yang berada dalam kondisi miskin. Lansia terlantar adalah kondisi lansia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus (Aritonang, 2021). Permasalahan lain pada saat ini ditengah masyarakat ditemukan banyak lansia keluarga tunggal belum dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu permakanan secara mandiri (Iskandar, 2023). Kondisi kehidupan lansia yang tinggal sendiri membebani masyarakat sekitar. Hingga saat ini kita masih dihadapkan pada realita lansia yang mengalami keterlantaran, kelaparan, keterasingan, bahkan meninggal dunia tanpa diketahui pihak lain. Terkait permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian Sosial terus terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada para lansia keluarga tunggal di Indonesia terutama untuk melindungi dari resiko kelaparan atau tidak terpenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan yang bila dibiarkan akan berakibat fatal.

Solusi untuk mengatasi masalah lansia keluarga tunggal yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan dilaksanakan melalui kegiatan pemberian makanan. Agar pelaksanaan pemberian permakanan dapat dilaksanakan dengan tertib, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat

sasaran maka perlu dibuat petunjuk teknis yang mengatur kegiatan pemberian permakanan bagi lansia keluarga tunggal.

Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Kabupaten/ kota sudah sedang kembali menjalankan program permakanan lansia dengan membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pengurus dari kegiatan permakanan tersebut dibawah Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. Dimana kelompok masyarakat tersebut terbentuk dari unsur pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Puskesmas dan Karang Taruna yang ditunjuk oleh Kecamatan dan berdasarkan Surat Keputusan Camat. Tugas Pokmas yaitu mengatur atau mengkondisikan permakanan bagi para lansia yaitu memasak tiap hari dan mengantarkannya kepada para lansia. Program ini sangat membantu para Lansia tunggal dimana mereka tidak lagi harus memikirkan makan apa yang dimakan hari ini karena yang diberikan adalah makanan siap konsumsi yang terdiri dari: Nasi, lauk Pauk, Sayur, Buah Potong dan Air Mineral yang diberikan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran. Prioritas Penerima manfaat yaitu terdaftar di DTKS, padan dukcapil dan pukan penerima PKH / sembako.

Tujuan dari program ini adalah sebagai upaya untuk penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi para Lanjut Usia. Ada 6 kriteria disabilitas

penerima manfaat permakanaan, yaitu miskin atau tidak mampu, penyandang disabilitas, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan atau purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga yang telah dipadankan dengan data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Sedangkan besarnya nominal untuk permakanaan tersebut sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) untuk satu kali makan dengan komponen : Nasi, lauk, sayur, Buah dan air Mineral dan satu orang lansia mendapatkan jatah permakanaan sebanyak 2 x yaitu untuk pagi dan sore hari, jadi untuk satu orang lansia pemerintah mencadangkan Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu Rupiah) perharinya.

Sementara untuk petugas masaknya yaitu kelompok masyarakat itu sendiri yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 orang Petugas Antar. Komponen dari penerima manfaat permakanaan lansia pastinya para lanjut usia yang terlantar hidup sebatang kara yang hanya hidup sendiri dirumah dikarenakan anak-anaknya tidak ada karena jauh

rumahnya atau memang tidak mau mengurus orangtuanya yang sudah lanjut usia dan merepotkan dan para lanjut usia yang menghabiskan waktunya di tempat tidur, tidak dapat bekerja karena mengalami penurunan kemampuan fisik, dan bergantung pada bantuan orang lain.

Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung ada 23 kecamatan yang menerima untuk penyaluran program bantuan permakanaan lanjut usia dan 8 Kecamatan yang menolak untuk penyaluran program bantuan permakanaan lanjut usia dengan alasan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai dengan data di lapangan serta jumlah BOP dari pengantaran untuk penyaluran yang tidak sesuai dengan kinerja para relawan di lapangan.

Peneliti melihat Kecamatan Paseh menjadi salah satu kecamatan yang menerima atau menyetujui untuk penyaluran program bantuan permakanaan lanjut usia dengan alasan Kecamatan Paseh merupakan Kecamatan yang masuk 4 besar dalam verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung dengan Jumlah DTKS yang cukup tinggi.

Tabel 1. Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung Per-Desember 2023.

No	Kecamatan	Jumlah DTKS	Jumlah DTKS yang sudah Verifikasi
1	Pangalengan	46.646	2.548
2	Majalaya	36.076	3.432
3	Pacet	36.978	974
4	Paseh	30.760	790

Sumber: Aplikasi dibedakeun Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2023

Pencapaian baik dalam verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial ini membuat peneliti ingin meneliti bagaimana program permakanan ini berjalan di Kecamatan Paseh sementara angka kemiskinan lebih tinggi dengan angka penerima manfaat

permakanan lansia yang presentasenya jauh lebih kecil.

Jumlah penerima manfaat permakanan lanjut usia tunggal atau terlantar di Kecamatan Paseh sebanyak 106 lansia yang tersebar di 12 (dua Belas) Desa yang ada di Kecamatan Paseh.

Tabel 2. Jumlah penerima manfaat Permakanan Lanjut usia di Kecamatan Paseh

No	Desa	Jumlah Penerima Manfaat
1	Loa	11 (Sebelas)
2	Cipaku	9 (Sembilan)
3	Mekar Pawitan	6 (Enam)
4	Cijagra	9 (Sembilan)
5	Drawati	8 (Delapan)
6	Cipedes	9 (Sembilan)
7	Cigentur	9 (Sembilan)
8	Sukamanah	9 (Sembilan)
9	Sukamantri	9 (Sembilan)
10	Sindangsari	9 (Sembilan)
11	Karang Tunggal	9 (Sembilan)
12	Tangsi	9 (Sembilan)
	Jumlah	106 (Seratus Enam)

Sumber: Kelompok Masyarakat Pemakanan Lanjut Usia Kecamatan Paseh

Berdasarkan tabel diatas secara umum penerima manfaat permakanan lansia ini masih sangat minim mengingat masih banyaknya lansia di setiap desa yang layak menerima bantuan tersebut. Namun setelah diamati pada tata cara proses pada pelaksanaan program bantuan permakanan lansia di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan ditemukan beberapa fenomena yang muncul berkenaan dengan hal ini yang diantaranya seperti: Keterlibatan para Kepala

Desa, Kepala Desa yang kurang mendukung akan adanya kegiatan permakanan lansia ini dikarenakan jumlah penerima manfaat tidak sesuai dengan data yang ada dilapangan.

Perbandingan yang mendapat bantuan permakanan lansia dari Jumlah penerima manfaat Pemerlu Kesejahteraan Sosial yang harusnya mendapat bantuan permakanan lansia dengan alasan tidak merata serta terbatasnya jumlah lansia penerima program permakanan tersebut sehingga

masih banyak para lansia yang belum bisa merasakan program pemberian makan sehat untuk para lansia dan membahayakan para Kepala Desa untuk bisa berpolitik dalam pemilihan kepala Desa apabila seperti itu yang menganggap Kepala Desa tidak adil.

Kegiatan Program Permakanaan Lansia ini pun masih kurang perhatian pemerintah kepada Kelompok Masyarakat yang menjadi petugas untuk mengatur penyaluran dari permakan lansia tersebut dimana para petugas antar yang mengantarkan makanan untuk para lansia hanya diberikan Rp. 1000/ KPM dalam 1 kali pengantaran sementara jarak tempuh dari penerima satu ke penerima lainnya cukup jauh dengan harus menyertakan atau mengupload foto bukti bahwa makanan sudah diterima oleh para lanjut usia dengan kendala jaringan yang kurang baik dan server dari aplikasi yang terkadang gangguan, dan otomatis para petugas antar tersebut harus selalu mempunyai kuota internet yang dibutuhkan pada saat penguploadan dan itu sama sekali tidak ada anggrannya.

METODE PENELITIAN

Dalam Menyusun proses penelitian hingga mencapai harapan yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa cara yang peneliti akan lakukan guna mencapai tujuan tersebut. Diantaranya yaitu pertama metode penelitian; dimana metode yang peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu berjenis penelitian kualitatif

dengan pertimbangan bahwa metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Surya, 2016).

Kedua, setelah peneliti memilih metode penelitian maka selanjutnya adalah memilih jenis pendekatan, dimana peneliti memilih pendekatan studi kasus dengan perhatian, guna memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik di suatu konteks tertentu (Ferdika Pradana Adhi, 2022). Kemudian dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipadukan dengan teknik *snowball sampling*. Dimana *purposive sampling* ditujukan agar peneliti bisa memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam tentang program (Wiwin Yuliani, 2023) dan *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jaringan informan dari rekomendasi orang-orang yang telah diwawancarai sebelumnya (Mahin Naderifar, 2017).

Terakhir, dalam menghimpun data penelitian yang peneliti ingin dapatkan, peneliti menggunakan beberapa metode teknik pengumpulan data diataranya; (1) Observasi yang diartikan sebagai peneliti yang turun langsung ke Lokasi penelitian guna menghimpun data (Getar Pertiwi Rahmi, 2023), (2) Wawancara yang diartikan sebagai cara mendapatkan data penelitian

melalui bertanya dan interaksi *face to face* (Rosaliza, 2015), (3) Studi Pustaka sebagai teknik tambahan guna mendapatkan data-data penelitian yang dianggap mampu mendukung menyelesaikan penelitian ini, baik berupa dokumen, audio, video ataupun catatan-catatan informan (Nilamsari, 2014).

HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Implementasi Kegiatan Kelompok Masyarakat pada Program Permakanaan Lanjut Usia (Lansia) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Program permakanaan lansia di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Sosial, yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial No. 18/4/HK.01/1/2024. Kebijakan ini berfokus pada standar layanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lansia melalui penyediaan makanan bergizi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menekankan bahwa pedoman ini bertujuan memastikan bahwa program rehabilitasi sosial berjalan efektif dengan kolaborasi berbagai pihak dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Di tingkat kecamatan, Camat Paseh dan Kepala Seksi Sosial Budaya bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program, memastikan kelancaran alokasi sumber daya, dan melakukan pemantauan serta evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai standar operasional

prosedur (SOP). Mereka bekerja sama dengan TSKK yang bertugas di lapangan, memverifikasi data penerima manfaat, dan memfasilitasi distribusi bantuan. Sistem pemantauan dan evaluasi yang teratur diperlukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program.

Selain itu, para kepala desa seperti Kepala Desa Loa, Cijagra, dan Sukamanah menyambut baik program ini, menganggapnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan lansia dengan menyediakan asupan makanan yang lebih layak dan bergizi. Berdasarkan wawancara dengan para pemangku kebijakan di kecamatan dan desa, tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan manfaat maksimal bagi lansia, sesuai dengan standar kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

2. Sumber daya pelaksana Implementasi Kegiatan Kelompok Masyarakat pada Program Permakanaan Lanjut Usia (Lansia) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Kebijakan program permakanaan lansia di Kecamatan Paseh didukung oleh anggaran yang langsung disalurkan dari APBN melalui Kementerian Sosial kepada kelompok masyarakat setempat. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dinas Sosial hanya berperan sebagai pengawas, sementara pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh kelompok masyarakat. Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Bidang Rehabilitasi

Sosial, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Camat Paseh turut memastikan pelaksanaan program diawasi oleh tim yang terdiri dari berbagai pihak untuk menjaga akuntabilitas.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi program, terutama terkait keterbatasan petugas antar makanan yang hanya berjumlah dua orang di wilayah Kecamatan Paseh, serta sulitnya akses sinyal untuk penggunaan aplikasi pemantauan penyaluran makanan. Ketua Kelompok Masyarakat Permakanaan Lansia menyoroti masalah ini, termasuk ongkos antar makanan yang sangat minim, hanya Rp1.000 per penerima manfaat. Kendala geografis juga menjadi faktor penghambat karena Kecamatan Paseh terletak di wilayah dataran tinggi dengan jarak antar desa yang jauh.

Di sisi lain, kepala desa seperti dari Loa, Cijagra, dan Sukamanah turut berperan dalam mendukung program dengan memberikan bantuan tambahan, seperti beras, sayuran, dan bensin bagi petugas antar. Meski bantuan ini bersifat sukarela, hal ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap kesejahteraan lansia dan kelancaran program di lapangan. Dengan keterlibatan banyak pihak dan tantangan yang ada, transparansi dan pengelolaan sumber daya yang baik tetap menjadi faktor kunci

keberhasilan program permakanaan lansia di Kecamatan Paseh.

3. Disposisi para pelaksana Implementasi Kegiatan Kelompok Masyarakat pada Program Permakanaan Lanjut Usia (Lansia) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Persepsi pelaksana dalam organisasi terkait implementasi program sering kali dipengaruhi oleh faktor pribadi, seperti sistem nilai, loyalitas, dan kepentingan individu. Dalam konteks Program Permakanaan Lansia di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung menyatakan bahwa Dinas Sosial sangat mendukung program ini dengan melakukan monitoring dan memastikan koordinasi yang baik dengan Kementerian Sosial serta pihak-pihak lain yang terlibat.

Koordinasi yang baik juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yang menyatakan bahwa pihaknya selalu bekerja sama dengan TKSK, Camat, Kasi Sosbud, dan kepala desa untuk memastikan program berjalan sesuai prosedur. TKSK, sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di lapangan, juga menyatakan bahwa koordinasi di tingkat kecamatan dan desa berlangsung dengan baik, dengan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas program.

Secara keseluruhan, koordinasi antara Dinas Sosial, TSKS, dan pihak wilayah, seperti Camat dan kepala desa, berjalan efektif, mendukung implementasi program secara optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Meter dan Horn, disposisi pelaksana dalam Program Permakanaan Lansia di Kecamatan Paseh menunjukkan tingkat koordinasi yang baik, yang berperan penting dalam keberhasilan program sesuai dengan prosedur Kementerian Sosial.

4. Karakteristik agen pelaksana Implementasi Kegiatan Kelompok Masyarakat pada Program Permakanaan Lanjut Usia (Lansia) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Karakteristik organisasi, seperti kompetensi staf dan keterbukaan komunikasi, berperan penting dalam keberhasilan program. Dalam Program Permakanaan Lansia di Kecamatan Paseh, agen pelaksana terdiri dari kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas operasional program. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, salah satu tantangan utama adalah medan wilayah Paseh yang luas dan sebagian besar berupa dataran tinggi, yang mempersulit proses pengantaran makanan tanpa membedakan operasional antara daerah dataran tinggi dan rendah.

Camat Paseh menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi pelaksana adalah jarak antar desa yang jauh, namun petugas tetap melaksanakan tugas dengan empati dan kepedulian terhadap lansia. Para penerima manfaat program

merespon positif, menyatakan bahwa kualitas makanan baik dan petugas pengantar sangat ramah. Beberapa penerima manfaat bahkan merasa sedih saat pengantaran makanan terhenti, menandakan betapa pentingnya program ini bagi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan para penerima manfaat dan Ketua Kelompok Masyarakat, kualitas makanan dan pelayanan yang diberikan kepada lansia sangat dijaga. Meskipun medan dan jarak tempuh menjadi tantangan, agen pelaksana tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik, sesuai dengan teori Meter dan Horn yang menekankan pentingnya karakteristik agen pelaksana dalam mendukung kinerja program.

PENUTUP

Implementasi program permakanaan lansia oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan publik oleh Meter dan Horn. Program ini berjalan dengan baik karena memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia melalui penyediaan makanan bergizi. Kejelasan tujuan ini memandu para agen pelaksana dalam menjalankan program. Selain itu, alokasi anggaran yang terealisasikan dengan baik dan pertanggungjawaban yang transparan juga menjadi faktor penting dalam kelancaran program.

Kolaborasi antara berbagai lembaga serta organisasi

memperkuat implementasi program dengan sinergi sumber daya yang efektif. Mekanisme pemantauan yang baik memastikan akuntabilitas dan memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Keberhasilan program juga didukung oleh kompetensi agen pelaksana yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan lansia serta tantangan operasional. Agen pelaksana yang berdedikasi dan memiliki keterampilan manajemen serta empati terhadap lansia memastikan pelayanan berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsal, M. S. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Sah Media: Gowa.
- Aritonang, N. S. (2021). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Majalah Media Perencana*, 100-107.
- Badan Pusat Statistika. (2023, June 28). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. Retrieved from Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/id/statistic-s-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Chairika Nasution, H. T. (2016). Implementasi kebijakan program pembinaan dinas sosial dan tenaga kerja terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 105-119.
- Elda Azizah Wahyu, S. H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 167-180.
- Elsye Rahmawaty, S. H. (2019). Sosialisasi dan harmonisasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (pis-pk) di Kota Sukabumi. *LINK*, 27-31.
- Ferdika Pradana Adhi, R. W. (2022). Strategi Pengembangan Usaha 'Dika Ban Kalasan' Dengan Pendekatan Matriks Space (Pendekatan Studi Kasus). *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 203-218.
- Fuadi, H. (2021). Analisis Dampak Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (Data SP2020) Terhadap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 148-155.
- Getar Pertiwi Rahmi, M. S. (2023). Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 41-52.
- Herry, C. (2023). COPING STRATEGY LANJUT USIA DALAM PEMENUHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SINDANG KASIH KECAMATAN

- PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 169-188.
- Heryanah. (2015). Ageing population dan bonus demografi kedua di Indonesia. *Populasi*, 1-16.
- Iskandar, A. (2023). *Filantropi Kebencanaan: Wakaf Undercover untuk Penyintas Erupsi*. Sukabumi: CV Jejak.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah. Journal of Islamic Economics*, 81-99.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Mahin Naderifar, H. G. (2017). Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research. *Strides in development of medical education*, 1-6.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 177-181.
- Rahmawati, A. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita dan kebijakan fiskal terhadap konsumsi energi minyak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 10(1).
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 56-63.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal ilmu budaya*, 71-79.
- Sintya Risfi, H. (2019). Kemandirian Pada Usia Lanjut. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 152-165.
- Siti Saputri Febriyanti, P. H. (2019). Interelasi Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 91-110.
- Surya, G. G. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal fokus konseling*, 2(2).
- Wiwin Yuliani, E. S. (2023). *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Bandung: Penerbit Widina.